



Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Bidang Pertanian: Studi Kasus di Desa Bajiminasa

Ardiansyah Bahr¹, A. Nur Achsanuddin², A. Nur Fitrianti³

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: ardiansyahbahrn5@gmail.com

Received: 20 Mei 2025

Revised: 27 Desember 2025

Accepted: 30 Desember 2025

ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the role of the village government in empowering the local economy in the agricultural sector, with a focus on Bajiminasa Village, Rilau Ale Sub-district, Bulukumba Regency. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation involving village officials and members of the farming community. The research findings indicate that the village government plays a role as a facilitator, supervisor, and provider of information in efforts to empower farmers. The government also strives to enhance farmers' capacity through the formation of farmer groups, the provision of infrastructure and facilities, and agricultural technical training. However, the implementation of these programs faces several challenges, such as low farmer participation and limited budget resources. Nevertheless, with strong leadership from the village head and collaboration between the government and the community, various economic empowerment initiatives have been implemented quite effectively. This study recommends increasing community participation, optimizing budget allocation, and promoting cross-sectoral collaboration to strengthen the role of village government in sustainable agriculture-based economic development.

Keywords: Village government, economic empowerment, agriculture.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang pertanian, dengan fokus pada Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan deskriptif kualitatif, Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari aparat desa dan masyarakat petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa berperan sebagai fasilitator, pengawas, dan penyedia informasi dalam upaya pemberdayaan petani. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kapasitas petani melalui pembentukan kelompok tani, penyediaan sarana prasarana, dan pelatihan teknis pertanian. Meskipun demikian, terdapat kendala yang menghambat pelaksanaan program, seperti rendahnya partisipasi petani dan keterbatasan anggaran. Namun, dengan dukungan kepemimpinan kepala desa yang kuat dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, berbagai inisiatif pemberdayaan ekonomi mampu berjalan cukup efektif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan partisipasi masyarakat, optimalisasi anggaran, dan kerja sama lintas sektor guna memperkuat peran pemerintah desa dalam pembangunan ekonomi berbasis pertanian yang berkelanjutan.

Keywords: Pemerintah desa, pemberdayaan ekonomi, pertanian.

©2025 by Ardiansyah Bahr¹, A. Nur Achsanuddin, A. Nur Fitrianti
Under the license CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara agraris, dengan sekitar 38,23 juta penduduk atau 29,76% tenaga kerja bergantung pada sektor pertanian (BPS, 2022). Potensi



sumber daya alam yang melimpah menjadikan pertanian sebagai penopang utama ekonomi, khususnya di daerah pedesaan. Profesi petani dan pedagang berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Sektor pertanian memerlukan dukungan aktif pemerintah, terutama di tingkat desa, karena mayoritas produksi berasal dari wilayah pedesaan. Pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai penghubung masyarakat dan pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan. Oleh karena itu, kolaborasi melalui program, pelatihan, dan penyediaan sarana prasarana menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat perekonomian nasional.

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia secara optimal. Pengelolaan yang tepat memungkinkan desa mengembangkan potensi lokal sekaligus mendorong kemandirian masyarakat. Salah satu aspek penting dalam upaya ini adalah pemberdayaan, khususnya di sektor pertanian, yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat desa (Siti Hajar, 2018).

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan lebih besar untuk menyusun dan menjalankan program pembangunan sesuai kebutuhan lokal (Mulyono et al., 2024). Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui sektor pertanian kini menjadi prioritas utama, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga sebagai upaya menciptakan pendapatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah desa dalam merancang kebijakan dan menciptakan iklim kondusif bagi petani sangatlah penting.\

Pemberdayaan ekonomi melalui sektor pertanian mencakup pelatihan, akses modal, dan penguatan pemasaran produk. Pemerintah desa berperan penting dalam menjalin kemitraan dengan lembaga pertanian, keuangan mikro, dan asosiasi petani guna meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola lahan dan produk secara profesional. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat desa terhadap pihak luar.

Selain itu, peningkatan infrastruktur pertanian seperti jalan desa, irigasi, dan fasilitas penyimpanan hasil panen menjadi fokus utama pemberdayaan.



Infrastruktur yang memadai mendukung distribusi yang efisien dan stabilisasi harga produk, sehingga memperkuat daya saing hasil pertanian di pasar yang lebih luas (Nelsi et al., 2024). Pemerintah desa juga berkontribusi melalui edukasi keberlanjutan, mendorong praktik pertanian ramah lingkungan agar sektor ini tetap menguntungkan secara ekonomi dan berkelanjutan secara ekologis.

Pembangunan kelembagaan, seperti pembentukan kelompok tani, juga penting untuk memperkuat kapasitas petani melalui kolaborasi dan akses program pemerintah. Namun, efektivitas pemberdayaan ini masih sering terkendala oleh keterbatasan anggaran dan minimnya sinergi antar instansi. Hal ini juga dirasakan di Desa Bajiminasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, di mana pertanian menjadi sumber pendapatan utama masyarakat. Oleh karena itu, peran strategis pemerintah desa dalam merancang program yang tepat sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi berbasis pertanian di wilayah pedesaan.

Di Desa Bajiminasa, petani masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses terhadap teknologi modern, benih unggul, pupuk berkualitas, dan pelatihan teknis. Dalam kondisi ini, peran pemerintah desa sebagai fasilitator menjadi sangat penting untuk menjembatani kebutuhan petani dengan sumber daya yang tersedia. Melalui program penyuluhan, pelatihan penggunaan alat pertanian modern, dan pengadaan sarana produksi, pemerintah desa dapat membantu meningkatkan kompetensi petani. Namun, pelaksanaan program sering kali terkendala oleh rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan anggaran.

Pembentukan kelompok tani menjadi strategi utama dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya sektor pertanian. Kelompok ini berfungsi sebagai sarana pertukaran pengetahuan dan akses terhadap bantuan pemerintah, sekaligus memperkuat sinergi antara petani dan pemerintah desa (Kusmana & Garis, 2019). Keberadaan kelembagaan petani yang aktif diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara kolektif.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk memahami dan menafsirkan fenomena secara mendalam melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen, sesuai dengan pendekatan Denzin dan Lincoln.



Penelitian ini dilakukan secara alami di Desa Bajiminasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Fokus penelitian diarahkan pada peran pemerintah desa dan masyarakat petani dalam pemberdayaan ekonomi di sektor pertanian, dengan jumlah informan petani sebanyak 10 orang. Data diperoleh melalui sumber primer, yakni observasi dan wawancara langsung dengan pemerintah desa dan masyarakat, serta data sekunder berupa dokumentasi dan studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik snowball sampling untuk memperoleh informan yang relevan hingga data dinilai cukup untuk dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Bidang Pertanian

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Desa Bajiminasa, pemberdayaan ini difokuskan pada petani padi, dengan pemerintah desa memegang peran penting, salah satunya sebagai pengawas dan pengarah. Peran ini mencakup pengawasan distribusi pupuk di setiap dusun, penyaluran bantuan, serta pengawasan kegiatan pertanian masyarakat, seperti gotong royong membersihkan jalan tani.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama dengan Kepala Desa Bajiminasa, bapak Anshar Arsyad yang mengatakan bahwa:

“Saya sebagai kepala desa di sini tentu harus mengarahkan dan mengawasi masyarakat saya secara keseluruhan. Dalam hal pertanian saya sebagai kepala desa harus mengarahkan dan mengawasi segala kegiatan masyarakat seperti dalam hal distribusi pupuk dan kegiatan-kegiatan gotong royong. Selain itu, khusus di bidang pertanian saya juga selalu mengingatkan dan mengarahkan masyarakat (para petani) untuk mengikuti segala kegiatan yang bersangkutan dengan pertanian seperti dalam kegiatan pembuatan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) krn Rdkk ini adalah alat perumusan/perencanaan yang dibuat ketua kelomok tani untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi dan alat mesin



pertanian atau dengan kata lain alat untuk memperoleh bantuan-bantuan seperti pupuk/bibit”.(Anshar Arsyad, wawancara, 2025).

Kemudian hasil wawancara bersama bapak Aldiansyah, selaku Sekretaris Desa, yang mengatakan bahwa:

“Saya di sini sebagai sekretaris desa jadi peran saya di sini lebih mengarah ke pengurusan administratifnya saja atau laporan-laporan tentang pengajuan bantuan pupuk dan bibit atau di sebut sebagai RDKK yang di buat oleh masyarakat untuk kemudian di ajukan ke penyuluh pertanian. Setiap masyarakat (ketua kelompok tani) sebelum mengajukan proposal (RDKK) itu harus datang kesaya terlebih dahulu untuk kemudian saya periksa lalu saya arahkan ke kepala desa untuk meminta persetujuan (tanda tangan dan stempel) untuk kemudian di kumpulkan ke penyuluh pertanian”. (Aldiansyah, wawancara, 2025).

Selanjutnya hasil wawancara bersama bapak Syamsuddin, selaku kepala dusun Batu Tompo yang mengatakan bahwa:

“Peran saya hanya mengarahkan masyarakat saja apabila ada pemberitahuan dari kepala desa atau ada informasi yang disampaikan sesama teman kepala dusun”. (Syamsuddin, wawancara, 2025).

Pemerintah sebagai fasilitator, kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sangat erat kaitannya dengan kemampuan masyarakat dalam melakukan kegiatan bertani. Dalam hal ini yang menjadi hal terpenting adalah apakah pemerintah desa bisa memfasilitasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat agar dalam melakukan kegiatan bertani masyarakat bisa bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal inilah pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi segala kegiatan masyarakat dalam kegiatan bertaninya.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama dengan kepala desa Bajiminasa, bapak Anshar Arsyad yang mengatakan bahwa:

“Peran saya sebagai orang kepercayaan yang telah dipilih oleh masyarakat bukan hanya yang saya katakan tadi tapi saya juga harus bisa sebagai jembatan bagi masyarakat saya dengan dinas pertanian agar bisa bekerja sama untuk membantu masyarakat agar mendapat bantuan seperti bantuan pupuk dan bantuan



peralatan dalam bertani. Karena banyak masyarakat yang mengeluh mengenai masalah itu, jadi saya usahakan dan Alhamdulillah sekarang peralatan dalam bertani seperti handtraktor yang berada di desa sekarang sudah ada 5. Meskipun sebenarnya belum cukup untuk masyarakat tapi setidaknya bisa membantu. Selain itu, ada juga masyarakat yang mengeluh masalah alat pemotong padi dan tempat khusus untuk menjual hasil panen mereka. Tetapi hal itu belum bisa terpenuhi karena hal itu membutuhkan dana besar sedangkan pemerintah bukan hanya fokus ke hal itu saja karena banyak bidang yang membutuhkan dana. Jadi, permasalahan hasil panen masyarakat pemerintah belum bisa ikut campur didalamnya”. (Anshar Arsyad, wawancara, 2025).

Pemerintah sebagai pemberi informasi, informasi adalah hal yang sangat penting untuk membantu meningkatkan pertanian yang ada di Desa Bajiminasa. Maka dari itu, pemerintah desa memiliki peran sebagai pemberi informasi kepada masyarakatnya terutama yang bekerja sebagai petani. Dimana pemberian informasi ini biasanya hanya dilakukan secara langsung kepada masyarakat. Informasi yang biasanya di sampaikan yaitu mengenai kegiatan penyuluhan dan pelatihan serta informasi tentang pembagian pupuk dan bibit.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama dengan kepala dusun Pandang-Pandang, bapak Muh. Darwis, yang mengatakan bahwa:

“Saya dengan kepala dusun lainnya selalu memberikan informasi kepada para petani apabila ada informasi baru yang kami dapat dari kepala desa. Seperti jika ada kegiatan penyuluhan dan pelatihan dari dinas pertanian dan biasanya kami sampaikan secara langsung seperti mendatangi rumah-rumah para petani untuk menyampaikan informasi itu. Terkadang juga kami sampaikan informasi itu, tapi masyarakat yang datang atau hadir masih kurang dan bahkan biasanya yang hadir hanya itu itu saja”. (Muh. Darwis, wawancara, 2025).

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Bidang Pertanian

a. Faktor Pendukung

1) Kepemimpinan Kepala Desa



Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu petani, bapak Rusli yang mengatakan bahwa:

“ Baiknya sikap kepala desa yang sekarang karena jika ada sesuatu yang di butuhkan biasanya beliau langsung ikut membantu kemudian beliau juga terbuka sehingga kita tidak sungkan untuk bicara langsung atau meminta sesuatu kebeliau. Selain itu, beliau juga apabila lewat naik motor dan kebetulan ada saya di depan rumah biasanya mampir dirumah untuk sekedar bertanya bagaimana keadaan padi disawah”. (Rusli, wawancara, 2025).

b. Faktor Penghambat

1) Kurangnya partisipasi para petani

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala dusun Bonto Baju, bapak Muh. Chaerul yang mengatakan bahwa:

“Permasalahan yang dihadapi itu memang sebagian besar dari masyarakat petani, karena biasanya apabila ada rapat atau kegiatan di kantor desa masyarakat yang hadir itu sangat kurang sedangkan para petani yang ada di desa ini berjumlah seribu lebih”. (Muh. Chaerul, wawancara, 2025).

Untuk mngetahui secara mendalam maka peneliti mewawancarai salah satu petani mengenai permasalahan bagaimana partisipasi para petani dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah, yaitu bapak Basri yang mengatakan bahwa:

“Jika membahas hadir atau tidak hadir dalam kegiatan-kegiatan yang ada di kantor desa memang saya jarang menghadiri itu, karena saya juga sibuk biasa saya pergi kesawah dan kebun pagi kemudian pulangny malam. Tapi bukan hanya saya saja banyak juga orang-orang (para petani) tidak menghadiri kegiatan itu karena biasa jika ada informasi dari kepala dusun tetap banyak orang yang saya liat untuk pergi kesawah dan kebun”. (Basri, wawancara, 2025).

2) Terbatasnya anggaran dana

Sebagaimana hasil wawancara kepala desa bersama dengan peneliti yang mengatakan bahwa:

“Yang menjadi persoalan utama yang sering dihadapi itu persoalan dana karena banyak petani mengeluh sama saya terutama masalah alat pemotong padi tapi



kembali lagi kita ini keterbatasan dana dan sering juga saya sampaikan apabila ada rapat di kecamatan tapi sampai sekarang tidak ada solusi yang di temukan untuk mengatasi hal itu”. (Anshar Arsyad, wawancara, 2025).

3. Langkah-langkah Yang Dilakukan Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Bidang Pertanian

Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bekerja sebagai petani yaitu dengan membentuk kelompok tani. Dalam kelompok tani tersebut maka pemerintah lebih mudah untuk kemudian bisa memberdayakan para petani.

Sebagaimana yang dikatakan oleh kepala desa Bajiminasa dalam wawancara bersama peneliti, yaitu:

“Membentuk kelompok tani memang adalah salah satu langkah saya untuk bisa memberdayakan petani karena dalam kelompok tani itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan dan tentu sangat bermanfaat untuk para petani seperti kegiatan pelatihan dan penyuluhan. Kegiatan pelatihan sama penyuluhan kami (pemerintah) bekerja sama dengan BPP. Dalam pelatihan itu masyarakat diberikan informasi dan dilatih dalam menyikapi masalah yang terjadi dalam kegiatan bertani seperti misalnya pencegahan hama”. (Anshar Arsyad, wawancara, 2025).

Untuk mengetahui secara mendalam persoalan pelatihan yang telah diberikan pemerintah desa ke para petani, maka peneliti mewawancarai bapak H. Tahir selaku anggota kelompok tani yang mengatakan bahwa:

“Jika bertanya masalah apakah ada pelatihan yang di adakan pemerintah untuk para petani, jawabannya Ya Ada tetapi kegiatan itu jarang diadakan di kantor desa, terakhir dua bulan yang lalu tentang pengendalian hama. Jika masalah pemilihan bibit itu tidak pernah dilakukan”. (H. Tahir, wawancara, 2025).

Selain kegiatan yang dilakukan pemerintah desa yang mana kegiatan tersebut adalah bentuk kerja sama dengan BPP, pemerintah juga melakukan kegiatan didalam kelompok tani tersebut yang mana kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dari pemerintah desa sendiri atau inisiatif dari pemerintah sendiri. Seperti



halnya yang dikatakan oleh Bapak Sekretaris Desa melalui wawancara bersama dengan peneliti yang mengatakan bahwa:

“Ada juga kegiatan lain yang kami (pemerintah) lakukan yaitu melatih dan mengajak para petani untuk membuat bendungan mini karena memang di desa ini tidak ada irigasinya jadi saya bekerja sama dengan para kepala dusun untuk membuat itu”. (Aldiansyah, wawancara, 2025).

Membangun sarana dan prasarana, berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama dengan kepala Desa Bajiminasa, bapak Anshar Arsyad mengatakan bahwa:

“Yang menjadi salah satu langkah saya bersama aparat desa lainnya, tentunya yaitu menyediakan keperluan masyarakat dalam bertani seperti pemberian bibit, bantuan pupuk dan handtraktor serta membangun sarana dan prasarana untuk melancarkan kegiatan masyarakat dalam bertani seperti kami membuat jalan tani sebanyak 7 yang masing-masing panjangnya sekitar 500 meter sampai 2.200 meter dengan lebar 3 meter, dimana setiap dusun itu mempunyai jalan tani untuk memudahkan petani untuk mengangkat hasil panennya ke jalan raya”. (Anshar Arsyad, wawancara, 2025).

Untuk mengetahui secara mendalam maka peneliti mewawancarai bapak Aliming selaku ketua kelompok tani mengenai sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah desa.

“Menegenai masalah sarana dan prasarana yang di sediakan oleh pemerintah desa, Alhamdulillah sudah saya rasakan yaitu seperti jalan tani dan pemberian bibit tanaman seperti bibit padi, alpukat dan bibit durian. Selain itu, ada juga pemberian bantuan handtraktor dari pemerintah desa”. (Aliming, wawancara, 2025).

Selanjutnya wawancara bersama dengan bapak Yunus selaku petani, dimana beliau mengatakan bahwa:

“Sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah itu sudah saya rasakan seperti pembangunan jalan tani. Jadi, jalan tani yang sudah dibangun pemerintah itu sebanyak 7, dimana di dusun Batu Tompo terdapat 2 jalan tani kemudian di dusun Pandan-Pandang juga terdapat 1 jalan tani, di dusun Sapepe 1 jalan tani, di dusun Pa’lipungan terdapat 2, dan di dusun Bonto Baju terdapat 1 jalan tani. Selain itu,



ada juga pemberian bantuan seperti bantuan pupuk dan bibit tanaman. Dimana banyaknya bantuan pupuk dan bibit ini tergantung dari lahan pertanian yang dimiliki petani. Misalnya untuk bantuan pupuk itu diperoleh 4 SAK/Ha sedangkan bantuan bibit padi diperoleh 50 kg/petani dan bantuan bibit tanaman 10 hingga 20 pohon/petani.” (Yunus, wawancara, 2025).

Pembahasan

1. Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Bidang Pertanian

Adapun peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang pertanian yaitu sebagai berikut:

a. Pemerintah desa sebagai fasilitator

Ujuran utama pemerintah desa adalah menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani. Sebagai fasilitator, pemerintah desa berperan dalam menyediakan berbagai kebutuhan pertanian, seperti pupuk, bibit, alat pembajak sawah (handtraktor), serta perbaikan jalan tani. Bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian terhadap petani, namun belum sepenuhnya mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kerja sama antara pemerintah sebagai pelaksana dan masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan. Peran fasilitator juga tidak hanya sebatas memberi bantuan fisik, tetapi mencakup pemberian dorongan agar masyarakat aktif berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan.

b. Pemerintah sebagai pengarah dan pengawas

Mengawasi dan mengarahkan merupakan bagian penting dari peran pemerintah desa dalam mendukung kelancaran aktivitas pertanian masyarakat. Peran ini mencakup pengawasan terhadap pendistribusian bantuan seperti pupuk dan bibit, serta pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur pertanian seperti jalan tani. Sebagai pengarah, pemerintah juga berperan dalam proses pengajuan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani), yaitu dengan membantu petani menyusun dan mengajukan proposal kebutuhan pertanian yang nantinya diserahkan kepada penyuluh untuk diinput dalam aplikasi Simluhtan. Selain itu,



pemerintah desa bekerja sama dengan BPP (Balai Penyuluh Pertanian) untuk memberikan bimbingan teknis kepada petani, termasuk cara menyusun RDKK dan mengendalikan hama. Dengan adanya peran sebagai pengarah dan pengawas, diharapkan kegiatan pertanian masyarakat dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.

c. Pemerintah desa sebagai pemberi informasi

Informasi merupakan faktor penting dalam menunjang kemajuan kegiatan pertanian di Desa Bajiminasa. Oleh karena itu, pemerintah desa mengambil peran sebagai penyampai informasi kepada para petani. Penyampaian informasi ini dapat dilakukan secara langsung, seperti mendatangi rumah-rumah petani, atau secara tidak langsung melalui ketua kelompok tani yang kemudian meneruskan informasi kepada anggotanya. Selain itu, informasi juga disampaikan melalui kegiatan rapat, sosialisasi, atau pertemuan kelompok. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa informasi yang diberikan oleh pemerintah desa umumnya berasal dari BPP dan mencakup hal-hal seperti pelatihan pertanian, kegiatan gotong royong, serta jadwal rapat atau sosialisasi lainnya.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Bidang Pertanian

a. Faktor Pendukung

1) Sikap kepemimpinan kepala desa

Salah satu pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bersikap adil, bertanggung jawab, memiliki sifat jujur, memiliki selera humor serta ingin mendengarkan keluhan para masyarakatnya dan sebagian besar inilah yang dimiliki oleh kepala desa Bajiminasa. Dimana kepala desa itu sendiri adalah seorang pemimpin yang harus dekat serta peduli terhadap kehidupan masyarakatnya tanpa menghilangkan serta mengurangi sikap wibawahnya sebagai seorang pemimpin di depan masyarakatnya. Sikap kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala desa tersebut menjadikan salah satu faktor pendukung dalam melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dibidang pertanian di desa Bajiminasa tersebut karena dengan adanya sikap tersebut maka para petani tidak sungkan menyampaikan segala keluhannya kepada pemimpinnya sendiri.



b. Faktor Penghambat

1) Kurangnya partisipasi para petani

Partisipasi masyarakat Desa Bajiminasa dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti sikap apatis atau kurang peduli dari sebagian masyarakat terhadap program yang dijalankan pemerintah desa. Selain itu, kesibukan dalam pekerjaan sehari-hari juga membuat sebagian warga tidak sempat mengikuti kegiatan pemberdayaan. Tidak sedikit pula masyarakat yang merasa kurang percaya diri atau enggan untuk menyampaikan pendapat, saran, atau aspirasinya secara langsung kepada pemerintah desa atau kelompok tani. Rendahnya partisipasi ini menjadi salah satu hambatan dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan pemberdayaan, khususnya di sektor pertanian. Padahal, partisipasi masyarakat sangat penting karena merupakan bentuk keikutsertaan aktif dalam proses pembangunan dan pemberdayaan. Tanpa adanya dukungan dan keterlibatan masyarakat, kegiatan pemberdayaan cenderung tidak berjalan maksimal dan tidak mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.

2) Terbatasnya anggaran dana

Dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat anggaran dana merupakan salah satu faktor pendukung untuk kelancaran dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan tersebut. Akan tetapi, anggaran dana dari pemerintah dalam bidang pertanian ini sangat kurang. Dimana anggaran dana dalam bidang pertanian yang ada di desa Bajiminasa yaitu sebesar Rp.194.325.400,00 yang mana dana ini dialokasikan untuk program ketahanan pangan seperti pembangunan sarana dan prasarana dalam bertani, peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit, pemanfaatan lahan non produktif untuk pertanian, serta kegiatan-kegiatan pelatihan yang mendukung peningkatan hasil pertanian.

3. Langkah-langkah yang Dilakukan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dibidang Pertanian



a. Membuat kelompok tani

Kelompok tani merupakan kumpulan para petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan dan kondisi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya, dimana dalam kelompok tani ini pemerintah desa dapat memberikan bantuan kepada para petani. Selain itu, kelompok tani ini dapat dijadikan sebagai wadah pemerintah untuk memberdayakan para petani seperti memberikan pelatihan kepada para petani.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kelompok tani yang ada di desa Bajiminasa sebanyak 15 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 35 sampai 50 orang. Dan dari penelitian ini dapat diketahui bahwa memang benar adanya kelompok tani ini dijadikan sebagai wadah pelatihan bagi para petani untuk meningkatkan pengetahuannya seperti bagaimana cara mengendalikan hama. Akan tetapi, kelompok tani ini belum di manfaatkan secara optimal oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan bahwa pemerintah jarang sekali memberikan pelatihan kepada para petani. Adapun nama-nama kelompok tani berikut ini:

Tabel 1. Nama-nama Kelompok Tani

No	Nama Kelompok Tani	Ketua Kelompok Tani
1	Pa'lipungan 1	Muh. Alwi
2	Pa'lipungan 2	Tamring
3	Anni'e 1	Abd. Latif
4	Anni'e 2	Muh. Asri
5	Lapepecu 1	Palalloi
6	Lapepecu 2	Muh. Akbar
7	Bantilang	Alimin
8	Pandang-pandang	Muh. Rijal
9	Sapepe	Firdaus
10	Bakara	H. Mustafa
11	Parang ma'roa	Noufal
12	Buhung Karaeng	Kr. Ali
13	Minasa tani	Hasyim
14	Bulu Cipeppa	Drs. Ridal
15	Bulu' ma' lere	Amirullah

Sumber : Kantor Desa Bajiminasa 2025

b. Menyediakan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu unsur yang sangat berpengaruh dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dibidang pertanian. Sarana dan prasarana inilah yang akan menuncang kelancaran kegiatan para petani dimulai dari awal penanaman sampai pada proses pemasaran hasil panen para petani.

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa sarana dan



prasarana yang telah pemerintah desa sediakan yaitu berupa jalan tani, pemberian bantuan berupa pupuk, bibit, dan alat pembajak sawah (handtraktor). Dimana banyaknya bantuan pupuk dan bibit yang diperoleh tergantung pada luasnya lahan yang di miliki masyarakat yang bekerja sebagai petani. Misalnya untuk bantuan pupuk dapat diperoleh 4 SAK/Ha sedangkan bantuan bibit padi diperoleh 50 kg/petani dan bantuan bibit tanaman 10 hingga 20 pohon/petani. Sedangkan untuk pembangunan jalan tani pemerintah telah membangun 7 jalan tani. Dimana di dusun Batu Tompo terdapat 2 jalan tani kemudian di dusun Pandang-pandang terdapat 1 jalan tani, di dusun Sapepe terdapat 1 jalan tani, di dusun Pa'lipungan terdapat 2, dan di dusun Bonto Baju terdapat 1 jalan tani, yang masing-masing mempunyai panjang sekitar 500 meter sampai 2.200 meter dengan lebar 3 meter. Kemudian untuk bantuan alat pembajak sawah (handtraktor) pemerintah telah memberikan bantuan handtraktor sebanyak 5 untuk memperlancar kegiatan masyarakat dalam bertani.

Hal inilah yang diberikan pemerintah desa untuk membantu serta menunjang kegiatan masyarakat terkhusus bagi masyarakat yang bekerja sebagai petani. Mengenai permasalahan yang dihadapi para petani dalam proses panen, pemerintah belum menyediakan sarana dan prasarana mengenai hal itu dikarenakan oleh terbatasnya dana yang dimiliki pemerintah desa.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berfungsi sebagai pengawas, fasilitator, dan pemberi informasi kepada petani. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham Dubaili (2019), yang juga menyoroti peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian. Dubaili menemukan bahwa pemerintah desa berfungsi sebagai motivator, fasilitator, dan penggerak yang penting untuk meningkatkan partisipasi petani.

Selain itu, penelitian oleh Endang Hermawan (2021) juga sejalan, yang menunjukkan bahwa pengawasan dan arahan dari pemerintah desa sangat diperlukan untuk memastikan distribusi bantuan dan keberhasilan program pertanian.

Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun pemerintah desa telah berperan baik, tantangan seperti kurangnya partisipasi petani dan terbatasnya anggaran dana



masih menjadi hambatan, yang juga diungkapkan oleh Muhammad Viki Nisfani Al Azis (2022) dalam penelitiannya tentang pemberdayaan masyarakat petani.

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya mengenai pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mencapai pemberdayaan ekonomi yang efektif

SIMPULAN

Pemerintah Desa Bajiminasa memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang pertanian melalui tiga fungsi utama, yaitu sebagai pengarah dan pengawas kegiatan pertanian, sebagai fasilitator yang menjembatani petani dengan sumber daya dan informasi, serta sebagai pemberi informasi terkait program dan pelatihan pertanian. Faktor pendukung utama dalam proses pemberdayaan ini adalah kepemimpinan kepala desa yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan petani, sedangkan faktor penghambatnya meliputi kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat serta keterbatasan anggaran yang tersedia untuk sektor pertanian. Adapun langkah-langkah konkret yang dilakukan pemerintah desa mencakup pembentukan kelompok tani sebagai wadah pelatihan dan penyuluhan, serta pembangunan sarana dan prasarana pertanian seperti jalan tani, penyediaan bibit unggul, pupuk, dan bantuan alat pertanian guna menunjang produktivitas dan kesejahteraan para petani. Pemerintah Desa Bajiminasa diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di bidang pertanian, tidak hanya terbatas pada pengawasan dan penyaluran bantuan, tetapi juga lebih aktif dalam mengadakan pelatihan, penyuluhan, serta membangun infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan tani yang sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran kegiatan bertani. Di sisi lain, para petani juga diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan, tidak hanya sebagai pendengar, tetapi juga turut berdiskusi dan mengambil peran secara langsung agar kegiatan pemberdayaan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Diatmika, I. P. G., & Rahayu, S. (2022). *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Peran Pemerintah*. Ahlimedia Book.



- Dubaili, M. I. (2019). *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian Desa Bulu Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, 7(3), 65-70.*
- Farid, M. M. (2022). *Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani di Desa Kota Bangun Ilir Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10(2), 66-76.*
- Hanani, N., Toiba, H., Asmara, R., Nugroho, T. W., Andajani, T. K., Nugroho, C. P., ... & Andrianto, B. (2023). *Pengantar ekonomi pertanian. Universitas Brawijaya Press.*
- Hermawan, E., Pebriyani, D., Julianty, D. N., Safitri, F., & Laksono, G. T. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(1), 191-198.*
- Kusmana, E., & Garis, R. R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian Oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Wilayah Binaan Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5(4), 460-473.*
- Mulyono, R. D. A. P., Rosa, D. V., Prasetyo, H., & Mahardiyanto, A. (2024). *Mentoring Smart Cultural Tourism Berbasis Potensi Lokal Menuju Kemandirian Ekonomi di Desa Klungkung Kabupaten Jember. Warta Pengabdian, 18(1), 70-88.*
- Nelsi, M., Akbar, I. R., & Kristianti, L. S. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Guna Mencapai Desa Mandiri Sejahtera Di Desa Rancasumur, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang-Banten. Abdi Jurnal Publikasi, 2(6), 255-263.*
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Governance, 1(2).*
- RESTI, R. (2022). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Bidang Pertanian (Studi Di Desa Tanjong Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu) (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).*
- Siti Hajar.dkk, *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir* (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqil, 2018) hal. 47
- Sitti Arwati, *Pengantar Ilmu Pertanian Berkelanjutan*, (Makassar: Inti Mediatama, 2018) hal. 1



Timotius, R. (2018). *Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(2), 323-344.*

Umar Sidiq. Moh. Miftachul Chori, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019) hal. 4-5

Yogi Pasca Pratama. Bhimo Rezky Samudro. *Kresno Sarasa Pribadi, Pemberdayaan Petani*, (Surakarta: CV Draf Media, 2018) hal. 1

<http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/12/sektor-pertanian-paling-banyak-menyerap-tenaga-kerja-indonesia> diakses pada 3 April 2022.